

**PENGARUH KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
DI BIDANG KEAMANAN**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu

Hubungan Internasional

Oleh:

Istiqomah Febrian Alda As'ad

E061181338

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI
POROS MARITIM DUNIA DI BIDANG KEAMANAN

N A M A : ISTIQOMAH FEBRIAN ALDA AS'AD

N I M : E061181338

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 24 Agustus 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D
NIP. 197602022000122003


Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIP. 198909132020053001

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,




H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA
DALAM UPAYA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI
POROS MARITIM DUNIA DI BIDANG KEAMANAN

N A M A : ISTIQOMAH FEBRIAN ALDA AS'AD

N I M : E061181338

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 23 Agustus 2022.

TIM EVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istiqomah Febrian Alda As'ad
NIM : E061181338
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Referensi untuk semua kutipan langsung maupun tidak langsung sudah dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Makassar, 7 September 2022



(Istiqomah Febrian Alda As'ad)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istiqomah Febrian Alda As'ad
NIM : E061181338
Program Studi : Hubungan Internasional
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENGARUH KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Makassar
Pada tanggal : 7 September 2022

Yang menyatakan,



(Istiqomah Febrian Alda As'ad)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kerja Sama Indonesia-Australia dalam Upaya Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di Bidang Keamanan”. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, karena berkat perjuangannya sehingga kita dapat menikmati indahnya islam hingga hari ini. Dalam menyelesaikan skripsi, penulis telah banyak mendapat bantuan serta dukungan, baik secara moril maupun materil, Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Kolonel Laut (KH) M.As'ad, S.Sos., M.Si dan Letkol CAJ (K) Dr. Muliani, M.Pd serta adik penulis, Khairah Ummah Febrian As'ad yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis.
2. H. Darwis, MA, Ph.D sebagai Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, dan Aswin Baharuddin, S.IP, M.A sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional.
3. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D sebagai pembimbing pertama dan Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis sejak awal pembuatan skripsi hingga selesai.
4. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional terkhusus Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Bapak (alm) Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Bapak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., dan Ibu Nurjannah Abdullah, S.IP., MA. Terima kasih atas ilmu, bimbingan dan pengetahuan yang

sangat berharga baik di akademik maupun non-akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin dan Staf Departemen, Bu Rahma, Kak Dayat, Kak Ita, dan Pak Ridho.

5. Yusril Ansari, sebagai orang yang memberikan semangat dengan caranya sendiri juga menghadapi masalah-masalah yang menyenangkan dari penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dan juga teman-teman *intimate* penulis disetiap keadaan yang bergantian menemani penulis dalam mengisi kehidupan kampus, keluh kesah penulis dan membantu penulis mengatasi kendala penyusunan skripsi.

Terima kasih atas semua bantuannya. Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Semoga penulis dapat memberikan kontribusi lainnya dan menghasilkan penelitian yang lebih baik. Akhir kata, penulis kembali menghaturkan terima kasih bagi setiap pihak yang berkontribusi maupun kepada pembaca.

Makassar, 7 September 2022

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia, yakni Perjanjian Lombok atau Lombok Treaty mengenai penegakan hukum, intelegen, pertahanan, terorisme, dan keamanan maritime. Kerja sama ini juga dilanjutkan dengan *MoU Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia* pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan visi bersama kemaritiman yang aman dan stabil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis lebih dalam terkait dengan kerja sama Indonesia dan Australia, serta bagaimana pengaruhnya dalam membantu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) dibidang keamanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data telaah Pustaka yang bersumber dari berbagai jurnal, artikel, buku, situs daring, dan juga berbagai penelitian yang berkorelasi dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama maritim untuk melihat hubungan kerja sama bilateral Indonesia dan Australia yang didasarkan pada permasalahan dan bertujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing negara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep diplomasi maritim untuk menunjukkan perilaku Indonesia yang menjalin hubungan kerja sama dengan Australia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kerja sama maritim yang di jalankan Indonesia dan Australia dalam *Memorandum of Understanding (MoU) Joint Declaration on Maritime Cooperations Between The Government Australian and Government of Republic Indonesia* tahun 2017 ini dapat berdampak pada usaha perwujudan Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi dibidang keamanan. Dengan melakukan diplomasi maritim dan dijalakannya kegiatan kerja sama maritim seperti latihan bersama, pertukaran personel, penegakan hukum laut, dan penanganan kegiatan *illegal fishing* di perbatasan. Sebagai kesimpulan, kerja sama maritim Indonesia dan Australia diimplementasikan dalam berbagai bentuk kerja sama yang memberikan dampak positif terhadap pembangunan kualitas personel, profesionalisme personel TNI AL dan RAN, serta adanya pertukaran informasi dalam pelaksanaan operasi keamanan maritim bersama Indonesia.

Kata Kunci: Kerja Sama Maritim, Kepentingan Nasional, Diplomasi Maritim, Militer, Keamanan

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of a cooperation agreement between Indonesia and Australia, namely the Lombok Treaty or the Lombok Treaty regarding law enforcement, intelligence, defense, terrorism, and maritime security. This collaboration was also continued with the MoU Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia during the Joko Widodo 19administration in realizing a shared vision of a safe and stable maritime. The purpose of this research is to see and analyze more deeply related to the cooperation between Indonesia and Australia, and how it influences in helping to realize Indonesia as the World Maritime Axis (PMD) in the field of security in the government of President Joko Widodo. The research method applied in writing this thesis uses a descriptive qualitative research type by using library research data collection techniques sourced from various journals, articles, books, online sites, as well as various studies that are correlated with this research. This study uses the concept of maritime cooperation to see the bilateral cooperation relationship between Indonesia and Australia which is based on problems and aims to achieve the interests of each country. In addition, this study also uses the concept of maritime diplomacy to show the behavior of Indonesia in establishing cooperative relations with Australia. The results of this study show that the maritime cooperation carried out by Indonesia and Australia in the Memorandum of Understanding (MoU) of the Joint Declaration on Maritime Cooperation between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia in 2017 can have an impact on efforts to realize the World Maritime Axis proclaimed by President Jokowi. in the field of security. By conducting maritime diplomacy and carrying out maritime cooperation activities such as joint exercises, personnel exchanges, law enforcement of the sea, and handling of illegal fishing activities at the border. In conclusion, Indonesia and Australia maritime cooperation is implemented in various forms of cooperation that have a positive impact on the development of the quality of personnel, the professionalism of the Indonesian Navy and National Defense Forces personnel, as well as the exchange of information in the implementation of maritime security operations with Indonesia.

Keyword: Maritime Cooperation, National Interest, Maritime Diplomacy, Military, Security

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4. Kerangka Konseptual	8
1.4.1. Kerja Sama Maritim.....	9
1.4.2. Diplomasi Maritim.....	12
1.5. Metode Penelitian.....	16
1.5.1. Jenis Penelitian.....	16
1.5.2. Jenis Data	16
1.5.3. Teknik Pengumpulan data.....	17
1.5.4. Teknik Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
2.1. Konsep Kerja Sama Maritim.....	18
2.2. Konsep Diplomasi Maritim.....	23
2.3. Penelitian Terdahulu	33
BAB III GAMBARAN UMUM	37
3.1. Agenda Poros Maritim Dunia Pada Pemerintahan Presiden Jokowi	37
3.2. Dinamika Hubungan Kerja Sama Indonesia-Australia	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	60
4.1. Bentuk Kerja Sama Indonesia dan Australia di Bidang Keamanan.....	60
4.1.1. Kerja Sama SAR (<i>Search and Rescue</i>)	65
4.1.2. Pertukaran Personel.....	68
4.1.3. Penanganan Kegiatan <i>Illegal Fishing</i>	72

4.1.4. Latihan Bersama (<i>Joint Patrol</i>).....	75
4.1.5. Kerja sama Teknis Pengamanan dan Penegakan Hukum	77
4.2. Dampak Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia dalam Upaya Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di Bidang Keamanan	81
4.2.1. Dampak Kerja Sama SAR (<i>Search and Rescue</i>).....	82
4.2.2. Dampak Pertukaran Personel	85
4.2.3. Dampak Penanganan Kegiatan <i>Illegal Fishing</i>	89
4.2.4. Dampak Latihan Bersama (<i>Joint Patrol</i>)	92
4.2.5. Dampak Kerja sama Teknis Pengamanan dan Penegakan Hukum.....	96
BAB V PENUTUP.....	100
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bentuk Kerja Sama Diplomasi Maritim dan Tujuannya	25
Gambar 3. 1 Batas Maritim RI-Australia.....	46
Gambar 4. 1 Arus Lalu Lintas <i>Illegal Fishing</i> oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Operasional Variabel.....	16
Tabel 2. 1 Operasional Variabel.....	32
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3. 1 Program AII	54
Tabel 4. 1 Peningkatan Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Indonesia di Wilayah	91
Tabel 4. 2 Kegiatan Coordinated Maritime Security Patrol Australia-Indonesia (CORPAT AUSINDO) Tahun 2018-2022.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilu Legislatif 2014, dimenangkan oleh Bapak Joko Widodo yang biasa dikenal sebagai Bapak Jokowi. Tepatnya pada Senin, 20 Oktober 2014 Jokowi resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia ketujuh dengan wakil Jusuf Kalla (Sasmito, 2019). Menggantikan posisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk periode selanjutnya. Presiden ketujuh ini mendapatkan popularitas yang sangat besar di masyarakat Indonesia. Beliau mulai terkenal sejak menjabat sebagai Gubernur Jakarta (2012-2014) yang sebelumnya menjabat sebagai Walikota Solo. Salah satu visi Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dengan pemerataan kemakmuran di Indonesia (Ramadhani, 2015). Visi ini menjadi ambisinya untuk membuat komitmen kekuatan politik pembangunan laut Indonesia.

Poros Maritim Dunia atau *Global Maritim Fulcrum* yang biasa disingkat PMD adalah kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang membangkitkan kembali semangat maritim terhadap bangsa Indonesia dengan menjadikan maritim sebagai titik fokus serta tujuan pembangunan kabinet kerja di masa pemerintahannya. PMD ini disuarakan sejak kampanye pemilu periode pertama di tahun 2014 untuk membangun dan menata laut yang akan menjadi modal untuk pembangunan mewujudkan kemakmuran bangsa serta meningkatkan konektivitas antar pulau melalui pembangunan infrastruktur dan perlindungan sumber daya maritim (Marzuki, 2018). Dengan cara ini, Indonesia mendorong perekonomian dengan memanfaatkan

letak negara yang strategis di persimpangan jalan samudera hindia dan samudera pasifik.

Poros Maritim Dunia pertama kali disampaikan secara internasional oleh Presiden di forum Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (*East Asia Summit*) pada 13 November 2014 di Naypyidaw, Myanmar (Suhaidi et al., 2020). PMD yang dicanangkan Presiden Jokowi ini memiliki lima pilar utama didalamnya yaitu budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, diplomasi maritim, dan keamanan maritim.

Pertama, budaya maritim pilar ini berfokus untuk membangun identitas nasional yaitu menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim. Kedua, yakni ekonomi maritim pilar ini menjalankan pengelolaan dan melestarikan sumber daya maritim bangsa Indonesia. Ketiga, konektivitas maritim yang mengutamakan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut. Keempat, diplomasi maritim mengoptimalkan *soft power* negara untuk menangani ancaman regional dan pengembangan kerja sama bilateral hingga multilateral dibidang maritim. Kelima, keamanan maritim pilar ini berupaya memperkuat *hard power* negara untuk mengembangkan kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam meningkatkan pengamanan wilayah negara (Suhaidi et al., 2020). Lima pilar tersebut menjadi fokus pembangunan pemerintahan Presiden Jokowi dibidang kemaritiman.

Poros Maritim Dunia sudah terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, bahwa “Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan

kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional (Pasal 1 ayat 2)” (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2017). Peraturan ini menjadi dasar terciptanya usaha Indonesia mengusung Poros Maritim Dunia.

Implementasi PMD ini bertujuan mewujudkan ambisi Presiden Joko Widodo. Terkait lima pilar tersebut, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi sebagai wujud nyata dari PMD berdasarkan pilar tersebut. Pilar pertama, Presiden Jokowi berkomitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan mengedepankan kehidupan nelayan yang sejahtera. Pilar kedua dan ketiga berhubungan dengan ekonomi Indonesia yang tidak akan berkembang apabila tidak didukung dengan infrastruktur yang baik. Pemerintah telah mendirikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) diikuti 10 kawasan lainnya. Dengan adanya SKPT ini diharapkan dapat meningkatkan stok ikan nasional yang awalnya hanya 7,3 juta ton pada 2013 menjadi 9,9 juta ton pada 2015 dan akan terus meningkat sekitar 7,34%. Pembangunan tol laut juga merupakan fokus pengembangan infrastruktur. Melalui konsep tol laut, selama lima tahun kedepan Indonesia akan membuat akses jalanan bebas hambatan enam jalur yang akan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan diseluruh Indonesia. Program tol laut ini mulai 2015 hingga Juni 2016, sudah ada enam jalur ini dari barat hingga timur Indonesia, pemerintahan Indonesia juga telah menetapkan 24 pelabuhan sebagai *Marine Link Node* dengan dukungan 47 pelabuhan non komersial dan 41 pelabuhan dalam pembangunan. Selain Pelabuhan, pengembangan bandara juga dipercepat sebagai “Jembatan Udara”. Menteri Perhubungan Budi Karya menilai program ini bisa berdampak pada penurunan harga barang 10% hingga 50% (Aufiya,

2017). Namun program ini akan terus dikembangkan hingga dapat dirasakan pemerataan ekonomi di Indonesia. Pilar keempat, Indonesia memperkuat diplomasi dibidang maritim, dengan mengajak negara mitra untuk bekerja sama dalam isu-isu kelautan untuk mengurangi dan menyelesaikan sengketa perbatasan.

Pilar kelima, Presiden Jokowi mendirikan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) sebagai bentuk upaya untuk melindungi keamanan maritim yang akan melaksanakan koordinasi patroli laut di dalam negeri dan Kawasan perbatasan (Laksmiana et al., 2018). Upaya ini di bangun untuk menghindari gangguan dari aktivitas maritim dan perdagangan laut di regional dan global.

Dalam mengimplementasikannya terdapat beberapa kendala yang terdiri dari segi manajerial dan operasional. Secara manajerial, terjadi tumpang tindih kebijakan dimana pengelola sumber daya bidang kelautan dilakukan oleh banyak instansi yang berada dibawah pemerintah. Saat ini, Indonesia memiliki 12 instansi yang bertugas diwilayah perairan ditambah BAKAMLA dengan tugas yang sama. Beberapa instansi memiliki bidang kerja berbeda namun fokusnya hampir sama (Latifah & Larasati, 2017). Contohnya, Direktorat Kelautan Perikanan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang memiliki ranah kerja hampir sama yaitu kelautan. Direktorat Kelautan Perikanan bertanggung jawab dalam hal perikanan sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai bertanggung jawab pada perdagangan hasil laut. Tingginya ego disetiap instansi untuk mempertahankan eksistensi juga merupakan kendala yang ada. Hal ini menyebabkan masing-masing instansi lebih memprioritaskan kepentingan departemennya sendiri.

Sementara itu, secara operasional masih terjadi perompakan dan pembajakan senjata di laut, pelanggaran batas negara serta kejahatan *illegal fishing*. Salah satu

kasusnya yaitu pembajakan kapal Pandu Brahma 12. Kapal ini bermuatan batu bara hasil perusahaan tambang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurut Kompas, kapal Pandu Brahma 12 ini disandera oleh kelompok teroris Filipina Abu Sayyaf pada Maret 2016 di sekitaran kepulauan Sulu dan meminta tebusan sekitar 50 juta sepo setara dengan 14,3 miliar (Gatra, 2016). Biro Maritim Internasional menegaskan, perairan Indonesia sebagai salah satu kawasan yang berbahaya di dunia dengan jumlah kasus perompakan yang tinggi. Kendala operasional lainnya, ialah permasalahan *illegal fishing* di batas negara (Latifah & Larasati, 2017). Permasalahan ini sering terjadi di Indonesia dan menjadi kendala yang serius karena menyangkut kedaulatan wilayah dan stabilitas negara. Secara langsung kejadian-kejadian tadi juga dapat menghambat terlaksananya PMD.

Upaya yang dilakukan untuk mentaktisi kendala dari Implementasi PMD adalah dengan melakukan Kerjasama dengan negara lain. Adapun Kerjasama yang dilakukan Indonesia ialah salah satunya dengan Australia. Dalam konteks PMD ini, Kerja sama Indonesia-Australia berporos dibidang keamanan maritim dan ekonomi. Kerjasama kedua negara ini dalam bidang kemanan maritim adalah *Bali Process* dan Perjanjian Lombok atau *Lombok Treaty* yang merupakan Kerjasama lanjutan dari kepemimpinan sebelumnya. *Bali Process* merupakan sebuah forum dialog kebijakan dan kerja sama praktis tentang penyelundupan manusia, dan kejahatan lintas negara (Governments of Japan New Zealand and Australia, 2018). *Bali Process* ini diketuai oleh Indonesia dan Australia yang dimulai sejak tahun 2002. Forum ini memiliki 49 anggota , termasuk Komisariss Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional untuk

Migrasi (IOM), Kantor Narkoba dan Kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNODC) dan International Labour Organization (ILO), serta sejumlah negara pengamat dan lembaga internasional.

Perjanjian Lombok atau *Lombok Treaty* ini merupakan perjanjian kerja sama yang telah diratifikasi pada 13 November 2006 di Lombok. Perjanjian ini meliputi tentang kerja sama penegakan hukum, intelegen, pertahanan, terorisme, dan keamanan maritim (Pewartu & Muhaj, 2008). Selain Kerjasama lanjutan dari kepemimpinan sebelumnya, dipemerintahan Presiden Jokowi ada inisiasi kerja sama baru yang dilakukan kedua negara yaitu *MoU Joint Declaration on a Comprehensive Strategic Partnership between Australia and the Republic of Indonesia*. Sebuah deklarasi tentang kemitraan strategis antar kedua negara yang merupakan babak baru dalam hubungan keduanya untuk memperdalam kerja sama yang ada serta mendukung inisiatif tersebut. Indonesia dan Australia melaksanakan deklarasi kerja sama maritim 2017 dan rencana aksi kerja sama maritim 2018 secara maksimal untuk mewujudkan visi bersama kemaritiman yang aman dan stabil dimana masyarakat dapat melaksanakan perdagangan maritim dan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan (Austrian Government, 2018). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melihat dan menganalisis lebih dalam terkait kerja sama Indonesia dan Australia dalam mengatasi membantu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

1.2. Batasan dan Rumusan Masalah

Penulis merumuskan batasan masalah merujuk pada kerja sama bilateral Indonesia-Australia dalam masa pemerintahan Joko Widodo di bidang maritim. Penulis juga

mengambil periode pemerintahan Joko Widodo (tahun 2014-2021) sebagai waktu penelitian untuk memfokuskan analisis topik Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi sebagai masa depan Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk kerja sama maritim Indonesia-Australia pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di bidang Keamanan?
2. Bagaimana dampak kerja sama Indonesia-Australia dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di bidang Keamanan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk,

- a. Untuk menganalisis bentuk kerja sama Indonesia-Australia pada masa pemerintahan Joko Widodo.
- b. Untuk mengidentifikasi dampak kerja sama Indonesia-Australia dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, ialah,

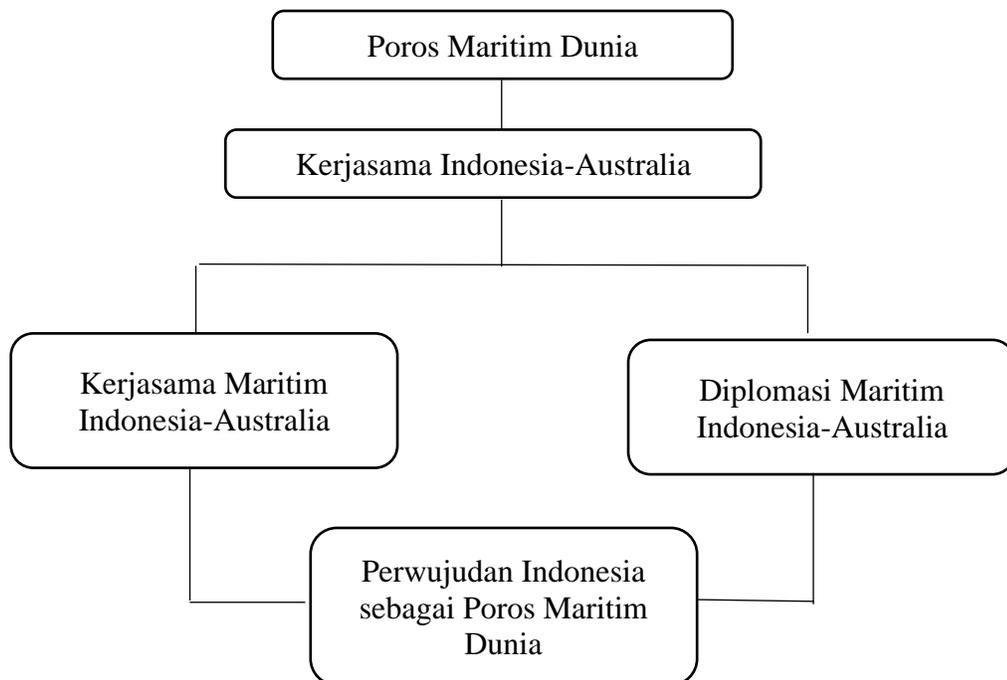
- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa Hubungan Internasional tentang hal-hal yang melandasi terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia di Masa Pemerintahan Joko Widodo.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dan bahan referensi mahasiswa tentang bagaimana kerja sama Internasional mempengaruhi masa depan negara.

1.4. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan dua konsep yang akan menjelaskan hubungan antara kedua variabel yang akan diteliti penulis. Konsep tersebut ialah kerja sama maritim dan diplomasi maritim. Kerja sama maritim mencoba menjelaskan hubungan bilateral Indonesia-Australia dalam implikasinya di PMD. Diplomasi Maritim mempresentasikan sikap dan upaya kedua negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui aktivitas kerja sama yang mengusung Poros Maritim Dunia.

Berikut penulis mencoba menguraikan dan merelevansi konsep-konsep diatas:



Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual

1.4.1. Kerja Sama Maritim

Pada masa ini hubungan antar negara sangat meningkat, penulis menggunakan teori Kerja Sama Internasional, karena semua negara di dunia ini tidak bisa berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan kekuatan negara masing-masing. Kerjasama dalam arti luas terjadi ketika negara berusaha mewujudkan tujuan mereka sendiri menggunakan kebijakan bersama dan memenuhi preferensi negara lain. Hubungan internasional berkembang ditandai dengan banyaknya kerja sama internasional dan berkembangnya diberbagai aspek seperti maritim.

Menurut Abraham Chayes dan Antonia Chayes, kerja sama harus ditunjang oleh standar internasional (Wandasari, 2018). Mereka mengakui bahwa kerjasama ditunjang oleh standar kepatuhan internasional bukan berdasar pada sanksi terhadap perlakuan. Mereka mengamati bahwa wewenang untuk memberlakukan sanksi jarang diberikan dan kemungkinan tidak efektif jika dilakukan.

Konsep kerja sama internasional ini memiliki dua elemen penting. Pertama, kerja sama internasional yang berasumsi bahwa perilaku setiap aktor diarahkan menuju suatu tujuan. Tujuan ini tidak harus menjadi tujuan yang sama untuk semua aktor yang terlibat dalam kerja sama tetapi tidak mengasumsi perilaku rasional di pihak kerja sama. Kedua, kerja sama internasional ini memberikan keuntungan atau timbal balik imbalan kepada para aktor. Keuntungan kerja sama tidak perlu sama besar atau setara untuk setiap aktor yang terlibat (Hurd, 2020). Setiap aktor membantu yang lain semata-

mata bertujuan agar mereka bisa menyesuaikan kebijakan dalam mengantisipasi keuntungan.

Kerjasama telah digambarkan sebagai suatu perangkat hubungan yang tidak didasarkan pada paksaan atau tekanan dan itu disahkan oleh persetujuan yang timbal balik oleh negara-negara anggota boleh mengembangkan hubungan secara kerjasama sebagai hasil keanggotaan mereka didalam organisasi internasional. Dan didalamnya memasukkan seperti disetujui aturan, peraturan, norma-norma, dan prosedur pengambilan keputusan, dimana negara mencari untuk memecahkan isu (Rondonuwu et al., 2019). Kekuatan hegemoni dapat menyediakan stabilitas yang meningkatkan keamanan hingga kesejahteraan ekonomi negara. Pola kerja sama ini tidak didasarkan oleh paksaan yang disahkan berdasarkan atas persetujuan bersama.

Kerja sama digolongkan menjadi tiga bentuk ialah kerja sama bilateral, kerja sama regional dan kerja sama multilateral. Kerja sama bilateral merupakan sebuah kerja sama yang dijalankan oleh dua negara. Kerja sama ini dilakukan secara diplomatik. Kerja sama regional merupakan kerja sama yang ada dan dilakukan disatu wilayah atau kawasan yang diikuti dari beberapa negara dalam kawasan tersebut. Sedangkan kerja sama multilateral ialah kerja sama yang memiliki jangkauan lebih luas lebih dari satu kawasan dan terdiri dari beberapa negara.

Kerjasama internasional dapat diklasifikasikan kedalam berbagai jenis, tergantung dari konteks kerjasama yang berusaha dibangun oleh kedua belah pihak seperti kerjasama ekonomi (yang dibangun atas dasar pembangunan ekonomi), kerjasama budaya (yang dibangun atas dasar kebudayaan), kerja sama keamanan (yang

dibangun atas dasar keamanan), dan kerjasama maritim (yang dibangun atas dasar kelautan dan dan kemaritiman).

Dalam hal maritim, kerja sama dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan kemaritiman negara. Kerja sama maritim merupakan suatu kewajiban yang dilakukan oleh negara-negara dalam hukum internasional yang baru. *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* menekankan bahwa, kerja sama maritim ialah kerja sama regional dalam pengelolaan laut negara yang bersifat komprehensif, khususnya dalam sumber daya dan lingkungan laut. Walaupun belum ada pedoman tentang pengaturan kelembangaan dalam mengimplementasikannya (Medeiros & Moreire, 2017). Negara melakukan kerja sama maritim dengan alasan keterbatasan politik pengelolaan laut, meningkatkan ekonomi (perdagangan dan investasi) dan lainnya dengan menjadikan pengelolaan laut sebagai fokus utama.

Terciptanya sebuah kerja sama maritim dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembangkan pengaturan antar negara yang dapat memungkinkan mereka untuk saling berbagi mengenai data dan juga meningkatkan kesadaran kegiatan di lepas pantai atau perbatasan negara-negara yang bersangkutan. Kerja sama maritim yang terjalin antar negara tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya keamanan maritim dan perbatasan masing-masing negara (Naval Studies Board, 2018). Hal ini menjadikan kerja sama maritim menjadi salah satu opsi negara untuk mengamankan kepentingan maritim negaranya. Hubungan yang dibangun berkaitan dengan saling berbagi informasi satu sama lain, baik itu di waktu normal maupun krisis untuk mengatasi permasalahan maritim yang muncul.

Dalam kerangka kerjasama maritim yang dibangun Indonesia, dibangun atas dasar gagasan poros maritim dunia yang dicetuskan Indonesia guna menjamin konektivitas antar pulau, meningkatkan transportasi laut, pengembangan industri, dan perkapalan serta fokus kepada keamanan maritim, yang kemudian terangkum kedalam 5 pilar utama. Adapun upaya yang bisa dilakukan Indonesia adalah dengan menjalankan kerjasama maritim dengan negara lain untuk pencapaian gagasan poros maritim dunia.

Dalam penelitian ini, mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia-Australia termasuk ke dalam kerjasama bilateral karena kerjasama tersebut dilakukan hanya dengan keduanya yaitu Indonesia dan Australia. Kerjasama yang dilakukan ini merupakan kebijakan dari keduanya yang dilakukan berdasarkan dengan permasalahan yang bertujuan untuk mencapai kepentingan masing-masing negara. Sehingga keuntungan dari kerjasama ini dapat mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dimana merupakan kepentingan nasional Indonesia itu sendiri.

1.4.2. Diplomasi Maritim

Diplomasi dipandang sebagai instrumen dalam melaksanakan kepentingan nasional suatu negara dan kebijakan luar negeri. Sebagai alat utama untuk mewujudkan kepentingan. Diplomasi sangat berkaitan dengan negara dan organisasi internasional. Negara dapat membangun citra yang baik melalui diplomasi. Dalam hubungan antar negara, umumnya diplomasi dilakukan diawal ketika negara hendak melakukan kerja sama bilateral dengan negara lain.

Sebagai instrumen antar negara untuk mencapai kepentingan nasional, diplomasi melahirkan berbagai macam bentuk dan jenis diplomasi. Salah satunya ialah diplomasi maritim (*maritim diplomacy*). Secara umum yang dimaksud diplomasi maritim ialah instrumen hubungan antar negara di bidang maritim.

Diplomasi maritim adalah istilah yang berlaku untuk berbagai macam kegiatan di wilayah maritim atau perairan dalam hal ini gugus tugas utamanya ada pada Angkatan Laut suatu negara berdaulat (Nugraha & Sudirman, 2016). Diplomasi maritim tidak hanya melibat diplomat sebagai representatif negara tapi juga melibatkan akademisi dan analis untuk mengkaji mengenai tren serta perkembangan yang terjadi dalam hubungan internasional dan keamanan global.

Christian Le'Miere mengklasifikasikan diplomasi maritim ke dalam tiga macam, yaitu kooperatif, koersif dan persuasif. Pertama, diplomasi maritim kooperatif yang mencakup keikutsertaan para aktor dalam segala aktivitas dengan negara lain dengan syarat melakukan kerja sama antar aktor dalam menyelesaikan masalah di bidang kemaritiman. Kedua, diplomasi maritim persuasif memiliki tujuan menguatkan pengakuan sebuah negara atau pihak lain pada kekuatan nasional yang dimiliki oleh negara tertentu serta dapat memengaruhi secara persuasif pihak lain terhadap kapabilitas dari negara tersebut. Ketiga, diplomasi koersif atau diplomasi kapal Meriam. Dimana diplomasi ini mengandalkan instrumen kekuatan militer negara atau *maritim force* untuk pengamanan kepentingan nasional di wilayah perairan negara (Le Miere, 2014). Klasifikasi ini digunakan untuk melihat bagaimana sikap negara dalam menjalankan hubungan kerja sama dibidang kemaritiman.

Dalam buku putih Diplomasi Maritim Indonesia, Diplomasi maritim didefinisikan sebagai pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk optimalisasi potensi kelautan yang bertujuan pemenuhan kepentingan nasional dan hukum internasional (Kementerian Koordinator Bidang Maritim, 2019). Berdasarkan definisi dari Buku Putih Diplomasi Maritim maka diplomasi maritim memiliki aspek yang tidak hanya terkait dengan aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan global, melainkan juga menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.

Dalam Dokumen Kebijakan Kelautan Nasional ditetapkan bahwa Program Utama dalam melaksanakan strategi kebijakan Diplomasi Maritim meliputi:

- a) Peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral;
- b) Peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan;
- c) Kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional di bidang kelautan;
- d) Percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga;
- e) Percepatan subsimi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan ketentuan hukum internasional;
- f) Peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan
- g) Pembakuan nama pulau

Relevansi antara buku putih Diplomasi Maritim Indonesia tersebut dengan diplomasi maritim berangkat dari sumber hukum Indonesia mengenai gagasan

Nasional Poros Maritim Dunia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2017). Dimana dalam Lampiran Perpres 16/2017 yang disebut sebagai Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia, pada BAB V menguraikan Pilar-Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, yang terdiri atas tujuh (7) Pilar, yang mana Pilar ke-7 adalah Diplomasi Maritim.

Pada penelitian ini penulis menggunakan diplomasi maritim dengan pendekatan kooperatif, untuk menunjukkan perilaku Indonesia yang menjalin hubungan kerja sama dengan Australia. Dengan membentuk berbagai forum kerja sama dan kesepakatan bilateral untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait kemaritiman serta batas zona ekonomi eksklusif yang dijalankan berdasar pada buku putih diplomasi kemaritiman Indonesia.

1.4.3. Operasional Variabel

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan dua variabel yang dibagi menjadi variabel independen dan dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yang dimaksud ialah Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Sedangkan variabel dependennya adalah kerja sama Indonesia-Australia. Kedua variabel ini nantinya akan di analisis dengan dua pendekatan yang menggabungkan kerja sama maritim dan diplomasi maritim Indonesia-Australia yaitu kerja sama keamanan maritim dan kerja sama ekonomi maritim dengan uraian operasionalisasi variabel sebagai berikut, yakni;

Tabel 1.1 Operasional Variabel

Variabel Dependen	Variabel Independen		Kategori	Indikator
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia	Kerja sama Indonesia-Australia	1. Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia Keterangan: Berfokus pada model kerja sama kedua negara	Kerja Sama Keamanan Maritim	1. Kerja Sama antara Lembaga Keamanan Maritim <ul style="list-style-type: none"> • <i>Information Sharing</i> terkait Data Keamanan Laut 2. Kerja Sama Maritim dalam Menangani Masalah dan Keamanan Perbatasan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Joint Patrol</i> Pengawasan Laut Kedua Negara • Latihan Bersama (TNI AL dan RAN)
		2. Diplomasi Maritim Indonesia-Australia Keterangan: Berfokus pada pelaksanaan model (sikap dan aktifitas aktor)	Kerja Sama Ekonomi Maritim	1. Kerja Sama terkait Keuangan Kemaritiman 2. Kerja Sama Infrastruktur Laut 3. Kerja Sama Perkembangan Ekonomi Biru <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Ekspor dan Impor • Kerja Sama Pengelolaan SDA Laut 4. <i>Information Sharing</i> terkait Data Ekonomi Maritim Kedua Negara

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah keadaan peristiwa atau bahkan fenomena sebagaimana adanya sehingga bersifat penggambaran terhadap fakta yang terjadi. Melalui pendekatan kualitatif, penulis akan menjelaskan pengaruh kerja sama Indonesia-Australia dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang akan mengeksplorasi hubungan kedua negara yang diteliti dan dijabarkan melalui data yang berupa kata-kata dan gambar.

1.5.2. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Berupa, data

terkait dengan hubungan kerja sama Indonesia-Australia disetiap masa pemerintahan di Indonesia serta Visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi.

1.5.3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan. Pengumpulan data pada penelitian ini dapat bersumber dari media elektronik dan nonelektronik.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan teknik analisis kualitatif. Teknik penelitian ini akan menganalisis permasalahan yang diteliti dengan menyajikan fakta-fakta yang ada, setelah itu dihubungkan dengan fakta-fakta lainnya dan menghasilkan sebuah argument yang akurat. Selain itu, teknik ini juga akan digunakan dalam mendeskripsikan dan menganalisis data-data untuk menunjang hasil dari hasil akhir penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kerja Sama Maritim

Di masa sekarang kerja sama menjadi salah satu jalan untuk negara saling berhubungan. Menurut Abraham Chayes dan Antonia Chayes, kerja sama harus ditunjang oleh standar internasional (Wandasari, 2018). Mereka mengakui bahwa diplomasi ditunjang oleh standar kepatuhan internasional bukan berdasar pada sanksi terhadap perlakuan. Mereka mengamati bahwa wewenang untuk memberlakukan sanksi jarang diberikan dan kemungkinan tidak efektif jika dilakukan. Kerja sama juga dapat terjadi sebagai hasil dari penyesuaian perilaku para aktor dalam menanggapi atau mengantisipasi pilihan dari aktor lain. Kerja sama juga dapat dinegosiasikan dalam proses tawar-menawar secara diam-diam.

Kerja sama ada membantu mencukupi kebutuhan masyarakat di negara yang melakukan. Menghindari konflik antar negara juga bisa terjadi apabila kerja sama dilakukan. Kerja sama dimulai karna terdapat keanekaragaman masalah dalam konteks nasional, regional maupun global yang muncul yang mengakibatkan perhatian lebih dari satu negara, dan melakukan pendekatan antar pemerintah dengan menawarkan penanggulangan masalah atau melakukan perundingan untuk mengatasi dan mengakhiri dengan sebuah kesepakatan atau perjanjian yang dapat memuaskan semua pihak.

Kerja sama dapat terlaksana berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh negara yang saling kerja sama. Terdapat berbagai bentuk kerja sama, dimana dapat

dibedakan dari perjanjian internasional yang dibuat sebagai landasan hukum kerja sama tersebut. Secara umum, kerja sama dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk yaitu kerja sama bilateral, regional, dan multilateral (F. T. Nugroho, 2021). Kerja sama bilateral ialah kerja sama yang dijalankan oleh dua negara atau lebih yang terikat di dalam satu perjanjian internasional tertentu seperti pada bidang pariwisata, maritim, ekonomi dan keamanan. Kerja sama regional merupakan sebuah kerja sama yang dijalankan oleh beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah yang sama seperti negara-negara di Asia Tenggara yang digabungkan menjadi ASEAN dan bergerak pada sektor kerja sama pertahanan, politik dan ekonomi. Kerja sama multilateral adalah kerja sama yang dilakukan lebih dari dua negara dan tidak memiliki batas pada wilayah negara dan statusnya.

Kerja sama internasional dapat diklasifikasikan diberbagai jenis, berdasarkan dari kerja sama yang akan dijalankan oleh negara yang bergabung seperti kerja sama ekonomi (yang dibangun atas dasar pembangunan ekonomi), kerja sama budaya (yang dibangun atas dasar kebudayaan), kerja sama keamanan (yang dibangun atas dasar keamanan), dan kerja sama maritim (yang dibangun atas dasar kelautan dan dan kemaritiman).

Dalam kerja sama maritim, laut menjadi fokus utama dijalankannya kerja sama. Laut berperan penting pada pembangunan manusia. Menurut Geoffrey Till ada empat faktor yang saling terkait dan bergantung. Laut memiliki sumber daya alam yang sangat banyak, laut menjadi salah satu alat transportasi dan perdagangan, sebagai sarana pertukaran informasi dan sebagai sumber kekuasaan (Damayanti, 2019). Peran ini semakin signifikan di era saat ini karena maritim menjadi simbol globalisasi untuk

barang-barang untuk didistribusikan, dijual, dan dikonsumsi di seluruh dunia. Belum lagi peluang untuk mengeksplorasi laut lebih jauh karena memiliki banyak informasi dibidang keamanan dan pertahanan laut, sehingga memberikan peluang yang lebih besar untuk melakukan penelitian kelautan.

Menurut *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* kerja sama maritim ialah sebuah kerja sama regional dalam pengembangan laut suatu negara yang berfokus pada sumber daya dan lingkungan laut. Potensial terjadinya kerja sama maritim biasanya berfokus pada kepelabuhanan, perkapalan, mengembangkan perjanjian pelayaran yang mencakup masalah-masalah seperti pelayaran pesisir dan juga asa cabotage yang dimana merupakan sebuah hak eksklusif dari kegiatan angkutan barang dan orang di dalam negeri dibawah perusahaan Angkatan laut nasional (Asia & Economic, 2019).

Kerja sama maritim dijalankan sebagai hubungan antara otoritas maritim lintas batas tentang kegiatan kemaritiman bersama, territorial menjadi aspek penting untuk kerja sama yang lebih besar dari kegiatan transnasional sesuai dengan kebijakan atau strategi yang dijalankan. Daerah pesisir juga termasuk dalam cakupan kerja sama maritim seperti garis pantai Channel yang termasuk dalam kerja sama maritim lintas batas pada program laut transnasional Eropa Barat.

Kerjasama maritim ini bertujuan untuk mengatasi ancaman tradisional yang terkait dengan laut manajemen serta untuk melawan tantangan nontradisional yang terutama terjadi di laut, seperti organisasi transnasional kejahatan dan bencana alam. Seperti mekanisme kerja sama sangat penting karena negara-negara Asia Tenggara dan Timur

terutama memiliki masalah umum untuk dilindungi laut mereka dan untuk menikmati manfaat dari mereka tanpa merugikan kepentingan negara lain (Damayanti, 2018).

Pada pasal 42 UNCLOS juga menjelaskan bahwa ada kewajiban kerja sama dimana negara-negara yang mendirikan memiliki kebutuhan permanen untuk menjaga laut (Medeiros & Moreire, 2017). Adanya keinginan untuk bekerja sama mengakibatkan sistem suatu negara dapat stabil karena adanya pemikiran gabungan dengan mekanisme pembangunan kepercayaan. Dalam hal kerja sama maritim, kepercayaan dibangun juga untuk mengatasi ancaman tradisional yang terkait dengan keamanan wilayah laut serta mengatasi tantangan nontradisional yang terjadi seperti kejahatan transnasional, kecelakaan laut, masalah perbatasan dan bencana alam.

Terciptanya sebuah kerja sama maritim dapat dilihat sebagai upaya untuk mengembangkan pengaturan antar negara yang dapat memungkinkan mereka untuk saling berbagi mengenai data dan juga meningkatkan kesadaran kegiatan di lepas pantai atau perbatasan negara-negara yang bersangkutan. Kerja sama maritim yang terjalin antar negara tidak lepas dari kesadaran akan pentingnya keamanan maritim dan perbatasan masing-masing negara (Naval Studies Board, 2018). Hal ini menjadikan kerja sama maritim menjadi salah satu opsi negara untuk mengamankan kepentingan maritim negaranya. Hubungan yang dibangun berkaitan dengan saling berbagi informasi satu sama lain, baik itu di waktu normal maupun krisis untuk mengatasi permasalahan maritim yang muncul.

Dalam konteks penelitian ini, kerja sama maritim merupakan implikasi dari kebutuhan kedua negara yaitu Indonesia-Australia yang kiranya dapat memenuhi kebutuhan terkait kemaritiman keduanya yang berfokus pada kerja sama keamanan

maritim negara. Dimana kemanan maritim ini dipahami sebagai usaha pengamanan negara dan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi di laut yang bersifat ilegal ataupun adanya kejahatan. Namun, seiring berkembangnya jaman laut kurang dimanfaatkan secara maksimal, sekiranya diperlukan tata kelola serta pengendalian peraturan di laut (Iswardhana, 2021). Kerja sama maritim di bidang keamanan merupakan suatu usaha negara dalam menjaga dan mengatur segala aktifitas laut yang dilakukan didalam perairan negara yang dapat mencegah atau mengatasi berbagai kegiatan dan kejahatan yang dapat mengancam secara nasional maupun internasional.

Pada tahun 2007, pasukan maritim Amerika Serikat dimana didalamnya ada Angkatan laut, korps marinir dan penjaga pantai membangun strategi maritim terpadu yang bernama A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower (CS-21). Strategi yang dibangun ini menekankan tentang bagaimana berkomitmen untuk melindungi negara dan memenangkan perang bangsa yang diimbangi dengan komitmen kekuatan maritim yang akan berkontribusi untuk meningkatkan keamanan, mencegah konflik, dan juga menang dalam peperangan (Mabus, 2015). Kebijakan ini mencakup koordinasi dari tiga layanan maritim untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan kerja sama kemanan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparat keamanan maritim negara meningkatkan interoperabilitas, dan memperkuat stabilitas regional dan global. Strategi ini juga bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang ingin menjalankan kerja sama maritim pada bidang keamanan.

Menurut CS-21 ada beberapa Langkah dari perberdayaan kerja sama keamanan maritim. Pertama, mengkoordinasikan tindakan mitra kerja sama agar lebih efisien dan efektif serta memungkinkan misi dari kerja sama tersebut terselesaikan sesuai yang

ditugaskan. Kedua, mengembangkan dan melaksanakan program pelatihan dan Pendidikan untuk memastikan bahwa negara yang bekerja sama memiliki pemahaman tentang kerja sama keamanan maritim dan keterampilan untuk melakukan perencanaan misi kerja sama keamanan maritim hingga tahap eksekusinya. Ketiga, mendukung penyedia kekuatan dan komponen regional dengan memanfaatkan keahlian unik yang dapat meningkatkan kerja sama dan menyediakan keahlian yang terintegrasi sebagaimana ini berlaku.

2.2. Konsep Diplomasi Maritim

Suatu negara dapat menjalin hubungan baik dengan negara lain dengan menjalankan diplomasi untuk mempengaruhi perilaku negara lain. Diplomasi maritim bisa dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan di wilayah maritim dengan menjadikan Angkatan laut negara yang berdaulat menjadi gugus utama jalannya diplomasi tersebut. Angkatan laut yang menjalankan diplomasi maritim tidak terlepas dari peran pemerintah, untuk membantu dan menjamin keuntungan atau mencegah kerugian negara. Diplomasi maritim dapat mengharuskan laut, *coast guard* dan semua kekuatan laut adalah alat negara yang dapat digunakan untuk kepentingan operasi maritim dan diplomasi maritim (Nugraha & Sudirman, 2016).

Diplomasi maritim dapat diartikan dalam Pertama, diplomasi maritim sebagai penggunaan berbagai instrumen kebijakan maritim seperti Angkatan Laut negara yang berdaulat dan *coast guard* untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri bagi negara-negara yang terlibat hubungan kerja sama seperti langkah-langkah membangun kepercayaan lewat perilaku interaksi yang dijalankan. Kedua, diplomasi maritim

menjadi penggunaan pendekatan tradisional dimana instrumen diplomasi (melalui diplomat) digunakan untuk menangani atau menyelesaikan masalah maritim, seperti delimitasi landas kontinen atau sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Sugiharto & Shafwatullah, 2021). Sebagian besar studi tentang diplomasi maritim fokus pada pemahaman yang pertama dan bukan yang kedua dimana gugus utama kegiatan diplomasi maritim negara dijalankan oleh Angkatan laut negara berdaulat.

Studi menunjukkan bahwa lembaga kepolisian maritim dan Angkatan laut negara di berbagai belahan dunia merupakan aktor utama dalam diplomasi maritim. Diplomasi maritim tidak hanya diartikan sebagai penggunaan diplomasi untuk mengelola konflik dan ketegangan antar negara terhadap masalah maritim yang melalui penyusunan instrument hukum internasional (Le Miere, 2014). Tetapi juga sebagai alat penggunaan aset atau sumber daya di wilayah maritim untuk mengatur segala hubungan antar negara dalam konteks kemaritiman.

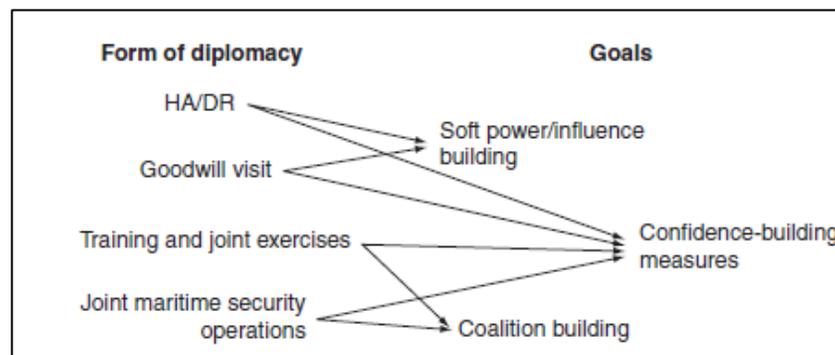
Diplomasi bagian dari pengelolaan hubungan internasional, diplomasi maritim juga bagian dari pengeloan manajemen hubungan internasional melalui wilayah maritim. Menurut Christian Le'Miere, diplomasi maritim dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu kooperatif, persuasif, dan koersif. Adapun ketiga macam diplomasi maritim yang dimaksud akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Diplomasi Maritim Kerja Sama (*Co-Operative Maritime Diplomacy*)

Diplomasi yang mencakup keikutsertaan para aktor dalam segala aktivitas dengan negara lain dengan syarat melakukan kerja sama antar aktor dalam menyelesaikan masalah di bidang kemaritiman. Diplomasi Maritim Kooperatif ini merupakan bukti fleksibilitas khusus dari kekuatan angkatan laut

negara (Laksana et al., 2018). Militer suatu negara sering dilihat sebagai aktor yang paling cocok untuk menjalankan misi di daerah-daerah terpencil dan sulit dijangkau seperti lautan. Dalam militer, angkatan laut merupakan layanan yang dapat beroperasi paling bebas di luar negeri karena tidak memerlukan hak pangkalan atau penerbangan saat berada di perairan internasional yang netral secara politik.

Diplomasi maritim yang kooperatif ini dapat menjadi upaya untuk mendukung *soft power* melalui aset *hard power*. Bahkan, diplomasi maritim kooperatif ini bisa dikatakan sebagai *soft maritime diplomacy* karena tidak menggeretak atau menghalangi bahkan membujuk dengan paksaan yang menuntut, melainkan dengan menarik perhatian dan melakukan usaha-usaha menginspirasi negara lain agar lebih berpengaruh (Le Miere, 2014) . Kontras dengan *hard maritime diplomacy* yang melibatkan peluncuran kapal perang terbatas untuk operasi hukuman terhadap armada laut yang melanggar.



Gambar 2.2 Bentuk Kerja Sama Diplomasi Maritim dan Tujuannya

Tujuan diplomasi maritim kooperatif ini membangun kepercayaan pihak kerja sama dengan membentuk koalisi baru, saling mendukung untuk meningkatkan kapasitas, melakukan pelatihan yang membangun kekuatan angkatan laut negara (Le Miere, 2014). Kunjungan pelabuhan reguler oleh angkatan laut ke negara-negara besar dan kecil juga sering dimaksudkan untuk membangun pengaruh diplomatik dan memperkuat aliansi.

2. Diplomasi Maritim Persuasif (*Persuasive Maritime Diplomacy*)

Ada berbagai macam cara yang dilakukan angkatan laut dan badan maritim negara untuk melakukan aktivitas politik selain dengan kooperatif. Salah satunya dengan diplomasi maritim persuasif. Menurut Miere, jika dalam diplomasi kooperatif tidak ada memaksa dan menuntut sesuatu, sebaliknya diplomasi persuasif ini ada untuk meningkatkan pengakuan kekuatan maritim atau nasional negara dan membangun prestise bagi bangsanya di atas panggung internasional.

Diplomasi ini juga dapat memengaruhi secara persuasif pihak lain terhadap kapabilitas dari negara tersebut. Tidak ditujukan kepada penerima tertentu, juga tidak dimaksudkan untuk menyerang ketakutan pada lawan yang kiranya berpotensi. Sebaliknya, diplomasi maritim persuasif ini ada untuk meyakinkan dan memperlihatkan kepada dunia bahwa angkatan laut negara atau militer umum layak hadir dan efektif (Le Miere, 2014). Dengan kata lain, diplomasi ini berjalan dengan cara memamerkan kekuatan militer yang dimiliki negara untuk menarik perhatian.

Diplomasi maritim persuasif ini mirip dengan yang dikenal sebagai *showing the flag*, dimana armada angkatan laut digunakan hanya untuk memberi isyarat kehadiran dan kemampuan militer yang dimiliki negara tanpa harus berusaha untuk mempengaruhi kebijakan dari negara lain. Contohnya, seperti peristiwa diplomatik pada acara Great White Fleet pada Desember 1907 dan Februari 1909 yang jalurnya mengelilingi dunia. Terdiri dari dua kapal perang skuadron dan pengawal kapal, pada saat itu Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt mengecat armada kapal militer dengan warna putih untuk menunjukkan arti kedamaian dan mengirim mereka dalam tur keliling dunia.

Diplomasi maritim persuasif jarang dilakukan dibandingkan dengan kooperatif dan koersif, dikarenakan efek atau dampak dari itu sering kali tidak tersampaikan dan kurang jelas. Operasi angkatan laut negara dan armada maritim yang dilaksanakan juga membutuhkan biaya yang besar dari biaya perjalanan armada militer (Le Miere, 2014). Tetapi, tujuan utamanya untuk menanamkan pada negara lain rasa kehadiran kekuatan maritim, tanpa berusaha mempengaruhi kebijakan dari aktor lain walaupun sulit dicapai dan tersampaikan.

3. Diplomasi Maritim Koersif (*Coercive Maritime Diplomacy*)

Bentuk terakhir dari diplomasi maritim ialah diplomasi maritim koersif. Diplomasi maritim ini mengandalkan persuasif kekuatan militer negara atau maritim force untuk pengamanan kepentingan nasional di wilayah perairan

negara seperti yang terlihat dalam konsep *gunboat diplomacy* atau diplomasi kapal perang.

Definisi yang jelas dari diplomasi kapal perang sulit dipahami dan dibuat semakin sulit oleh banyak bentuk dan insiden penggunaan kekuatan yang terbatas selama berabad-abad. Secara sederhana diplomasi kapal perang ini diartikan sebagai mengejar diplomasi melalui penggunaan kapal perang atau kemampuan angkatan laut negara (Le Miere, 2014). Selain angkatan laut sebagai representasi negara untuk mengelola hubungan internasional, penjaga pantai, badan kepolisian dan organisasi non-negara juga ada untuk memajukan tujuan kebijakan luar negeri melalui kekuatan.

Diplomasi maritim koersif ini berdasar pada demonstrasi dan kemampuan aktor dalam perselisihan atau dialog politik. Intensitas diplomasi, aset yang digunakan, dan ancaman atau pernyataan yang dikeluarkan semuanya adalah peringatan tentang pentingnya suatu masalah bagi para aktor dan betapa besarnya tanggung jawab dalam melindungi kepentingan tersebut (Le Miere, 2014). Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut aktor akan melakukan penyerangan dan kekerasan hingga penembakan pada setiap pihak yang melanggar kedaulatan teritorial negara tersebut.

Indonesia juga memiliki prinsip konsep terhadap diplomasi maritim. Diplomasi maritim yang dimiliki Indonesia tercantum pada Buku Putih. Untuk merealisasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia memiliki pedoman mengenai kebijakan wilayah maritim laut negara. Pedoman ini dibukukan dengan sebutan Buku Putih yang didalamnya telah dibukukan dalam

Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2007 tentang diplomasi maritim. Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan menerangkan bahwa ada 4 sasaran dalam buku putih tersebut, diantaranya perlindungan kedaulatan wilayah nasional, kesejahteraan dan keterhubungan, stabilitas Kawasan` dan global serta kapasitas nasional (Biro Komunikasi, 2019). Dengan buku putih ini sangat membantu Indonesia dalam menjalankan pengembangan wilayah maritim dengan banyak potensi-potensi yang akan dihasilkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia, bercita-cita untuk mewujudkan “negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian Kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional”. Dengan tujuh pilar dalam kebijakan tersebut meliputi (1) pengembangan sumber daya wilayah laut dan sumber daya manusia, (2) pertahanan, penegakan hukum, keselamatan laut serta keamanan, (3) tata 29embal dan kelembagaan laut, (4) ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, (5) pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, (6) budaya bahari dan (7) diplomasi maritim.

Salah satu pilar kebijakan kelautan yang dirancang ini berfokus pada diplomasi maritim yang nantinya akan menjamin terwujudnya cita-cita dan misi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Pada kebijakan ini diplomasi maritim merupakan suatu pelaksanaan politik luar negeri yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional

sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Prinsip dasar diplomasi maritim Indonesia ada tiga hal sebagai berikut:

1. Independent dan Proaktif

Ada dua hal yang mendasar dalam perkembangan hubungan luar negeri Indonesia yaitu identitas politik yang bebas aktif dan situasi internasional yang semakin dinamis. Kebijakan Indonesia yang bersifat independen diharapkan dapat menghindari Indonesia dari perdebatan antara aliansi atau kubu yang ada, melindungi kepentingan nasional negara, dan dapat menjalin hubungan baik dengan bangsa manapun yang dilandaskan pada asas saling menghargai. Independen yang dimiliki Indonesia ini mengacu pada kesepakatan untuk tidak tetap berpihak pada kubu yang berselisih satu dengan yang lain dan juga tidak secara tetap bertentangan pada posisi netralitas untuk setiap kejadian. Dimana yang dimaksudkan sikap independen ini memiliki nilai positif yang membuat Indonesia dapat menjanjikan peranan proaktif dalam mengupayakan dan mendukung usaha mengurangi dan menertibkan konflik internasional (Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, 2019). Hal ini akan terwujud apabila Indonesia tetap tegas untuk mengutamakan tujuan dan kedudukan Indonesia sendiri dalam usaha menjadi negara yang berpengaruh secara internasional.

2. Berorientasi Pada Pembangunan

Masa pemerintahan presiden Jokowi mencetuskan visi maritim Indonesia yang berorientasi untuk menjadikan negara sebagai poros yang aktif dan kuat dalam upaya menjaga ketertiban dunia pada wilayah maritim. Visi maritim ini sangat berkaitan pada visi pembangunan yang lebih luas. Untuk menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, visi pembangunan ini harus selaras dengan strategi diplomasi Indonesia yang mengarah pada komitmen posisi Indonesia dalam urusan eksternal (Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, 2019). Penghargaan dan konsistensi terhadap nilai dan norma internasional yang sejalan dengan kepentingan dan nilai-nilai yang dimiliki Indonesia juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan.

Kerangka kerja sama pembangunan internasional Indonesia harus sesuai dengan kepentingan nasional, Indonesia membuka kesempatan besar untuk inisiatif kerja sama dan investasi terkait infrastruktur nasional dengan memperhatikan kualitas proyek, lingkungan yang memadai serta mengoptimalkan pekerja lokal dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan Indonesia di masa depan.

3. Mengutamakan Pendekatan Berbasis Aturan (*Rules-Based Approach*).

Politik luar negeri Indonesia berlandaskan pada tujuan perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan social, Indonesia juga berusaha untuk menjamin keamanan internasional dengan mengutamakan tatanan bilateral, kawasan, dan global yang berdasar pada aturan dan kebiasaan-

kebiasaan internasional. Dalam menjalankan tujuan dari diplomasi maritimnya, Indonesia berbasis pada aturan yang telah ditetapkan dan diakui secara internasional pada konstitusi kelautan yaitu the United Nations Convention the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dan beberapa perjanjian internasional lainnya seperti Internasional Maritime Organization (IMO) atau organisasi internasional lain yang dimana Indonesia menjadi salah satu anggotanya (Kementrian Kordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, 2019). Dengan mengacu pada prinsip-prinsip ini, Buku Putih Diplomasi Maritim menjadi pendoman dalam menjalankan hubungan diplomasi khususnya menjawab tantangan dan kondisi geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi di kawasan serta isu-isu tradisional dan non-tradisional yang terjadi di wilayah kemaritiman negara.

Setelah menyusun tinjauan Pustaka, penulis merumuskan kembali Operasional Variabel yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Merumuskan kembali ini berguna untuk mendalami apa yang nantinya akan penulis analisis pada bab pembahasan, yakni:

Tabel 2.1 Operasional Variabel

Variabel Dependen	Variabel Independen		Kategori	Indikator
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia	Kerja Sama Indonesia-Australia	1. Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia Keterangan: Berfokus pada model kerja sama kedua negara 2. Diplomasi Maritim Indonesia-Australia Keterangan: Berfokus pada pelaksanaan model (sikap dan aktifitas aktor)	Kerja Sama SAR (Search and Rescue)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktor yang Terlibat • Agenda Kerja • Trust building antar Aktor
			Pertukaran Personel	<ul style="list-style-type: none"> • Aktor yang Terlibat • Agenda kerja • Interaksi
			Penanganan Kegiatan <i>Illegal Fishing</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktor yang Terlibat • Agenda Kerja • Trust building antar Aktor • Keberhasilan
			Latihan Bersama (<i>Joint Patrol</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktor yang Terlibat • Agenda Kerja • Trust building antar Aktor
			Kerja Sama Teknis Pengamanan dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Aktor yang Terlibat • Agenda Kerja • <i>Trust building</i> antar Aktor • Keberhasilan

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini bersifat orisinal dan merupakan gagasan baru dalam bidang keilmuan. Untuk membuktikan kebenarannya, dilampirkan beberapa penelitian sebagai tolak ukur bagi penulis dalam menganalisis karakteristik variabel dan metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya serta dijadikan sebagai pedoman penelitian serta landasan dalam mengerjakan skripsi dan dianggap relevan dengan penelitian ini.

Berikut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risky Amalia yang berjudul *Kerja Sama Maritim Indonesia-Tiongkok Menuju Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia* ditahun 2018, yang meneliti tentang hubungan kerja sama Indonesia dan Tiongkok dibidang ekonomi yang bisa membantu mencapai visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa kerja sama kedua negara tersebut mencakup keseluruhan komponen yang ada dalam visi poros maritim dunia sehingga dapat disimpulkan bahwa kerja sama maritim Indonesia-Tiongkok sangat mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia meskipun belum seluruhnya kerja sama tersebut dapat terealisasikan

Penelitian milik Muhammad Ridha yang berjudul *Kerja sama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard* ditahun 2021. Yang meneliti tentang hubungan kerja sama Amerika Serikat dan Indonesia dalam mengimplementasikan Politik Poros Maritim Indonesia melalui organisasi BAKAMLA-USGC tahun 2021. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa Kerjasama antara BAKAMLA RI dan USGC dapat meningkatkan adanya kapasitas dan kualitas dari BAKAMLA RI RI dengan didapatkannya berbagai tehnik, berbagi informasi dan pengalaman, membuat standar operasional, dan mendapatkan teknologi yang memudahkan BAKAMLA RI dalam menjaga keamanan laut Indonesia.

Penelitian milik Putri Auliya yang berjudul *Indonesia, ASEAN Centrality and Global Maritim Fulcrum* ditahun 2013. Yang meneliti tentang bagaimana Indonesia mewujudkan Poros Maritim Dunia yang didukung dengan eksistensinya di ASEAN. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa lemahnya kekuatan politik Indonesia memaksanya untuk mengandalkan ASEAN. Namun, ini merupakan Langkah penting

untuk memperkuat peran Indonesia untuk memperluas kekuatannya mewujudkan Poros Maritim Dunia.

Penelitian milik Kurniawan Firmuzi yang berjudul *Indonesia Poros Maritim Dunia: Mengembangkan Keamanan Nasional melalui Perspektif Kerjasama Pertahan di Kawasan ditahun 2021*, yang meneliti tentang mewujudkan Poros Maritim Dunia dalam proses pengembangan keamanan nasional yang dijalankan dengan kerja sama di kawasan perbatasan. Dengan hasil penelitian, PMD akan berhasil menjadi visi pembangunan bagi kesepakatan AOIP yang berfokus pada pada kerja sama dan pembangunan apabila memiliki keseimbangan ekonomi dan keamanan.

Penelitian Nanto Sryanto yang berjudul *Global Maritime Fulcrum, Indonesia-China Growing Relations, and Indonesia's middlepowermanship in The East Asia Region* ditahun 2018 yang meneliti tentang Perkembangan hubungan Indonesia-China di Kawasan Asia Timur selaras dengan pembangunan visi Poros Maritim Dunia. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada budaya maritim global sebagai strategi untuk mengejar ketinggalan di Kawasan Asia Timur. Tol laut merupakan elemen pendukung strategi yang berorientasi domestik sebelum dapat digunakan untuk kemampuan Indonesia secara internasional.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul Tulisan	Tujuan	Teori	Hasil Penelitian
Kerja Sama Maritim Indonesia-Tiongkok Menuju Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia	Menjelaskan kerja sama maritim Indonesia dan mengalisis hasil kerja sama dalam mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia	Kerja sama bilateral dan <i>Sea Power</i>	Kerja sama tersebut mencakup keseluruhan komponen yang ada dalam visi poros maritim dunia sehingga dapat disimpulkan bahwa kerja sama maritim Indonesia-Tiongkok sangat mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia meskipun belum seluruhnya kerja sama tersebut dapat terealisasikan
Kerja sama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard	Mengetahui perkembangan terakhir melalui media massa daring maupun literatur lainnya yang juga membahas mengenai keamanan maritim dan kerjasama BAKAMLA RI-US Coast Guard	Keamanan Maritim	Kerjasama antara BAKAMLA RI dan USGC dapat meningkatkan adanya kapasitas dan kualitas dari BAKAMLA RI RI dengan didapatkannya berbagai tehnik, berbagi informasi dan pengalaman, membuat standar operasional, dan mendapatkan teknologi yang memudahkan BAKAMLA RI dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
<i>Indonesia, ASEAN Centrality and Global Maritim Fulcrum</i>	Mengetahui alasan Indonesia menekankan sentralitas ASEAN dalam strategi Ino-Pacific untuk mencapai PMD.	Geopolitik Ekonomi	Lemahnya kekuatan politik Indonesia memaksanya untuk mengandalkan ASEAN. Namun, ini merupakan Langkah penting untuk memperkuat peran Indonesia untuk memperluas kekuatannya mewujudkan PMD.
Indonesia Poros Maritim Dunia: Mengembangkan Keamanan Nasional melalui Perspektif Kerjasama Pertahan di Kawasan	Mengetahui hubungan ASEAN <i>Outlook on Indo-Pacific</i> (AOIP) dalam hal kerjasama multilateral yang mempengaruhi pemberdayaan wilayah pertahanan laut di Indonesia	Keamanan Maritim	PMD akan berhasil menjadi visi pembangunan bagi kesepakatan AOIP yang berfokus pada pada kerja sama dan pembangunan apabila memiliki keseimbangan ekonomi dan keamanan.
<i>Global Maritime Fulcrum, Indonesia-China Growing Relations, and Indonesia's middlepowermanship in The East Asia Region</i>	Mengetahui bagaimana Indonesia mengimbangi beragam kepentingan tersebut tanpa mengganggu posisi dan kredibilitasnya sebagai negara kekuatan menengah.	Diplomasi	Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada budaya maritim global sebagai strategi untuk mengejar ketinggalan. Tol laut merupakan elemen pendukung strategi yang berorientasi domestik sebelum dapat digunakan untuk kemampuan Indonesia secara internasional.